

# **Peran Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Kelurahan Keputih Kota Surabaya**

**Emerius Weya**

*Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Surel: weyaemerius@gmail.com*

**Muchammad Wahyono**

*Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Surel: wahyono@untag.ac.id*

**Sukarno HS**

*Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Surel: Sukarno\_hs@untag-sby.ac.id*

## **Abstrak**

*Sebagai seorang kepala kecamatan, Camat adalah merupakan seorang pemimpin bagi aparatur dan masyarakat dalam wilayah kecamatan, yang mana dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Kepemimpinan camat sangat berpengaruh terhadap proses bekerjanya suatu sistem dari komponen-komponen (aparatur pemerintah kelurahan dan kecamatan) dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sehingga akan terwujud suatu kualitas kerja yang akan dicapai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Camat dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan. Penelitian ini berbentuk kualitatif yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Kinerja aparat Kelurahan belum maksimal terlihat dari beberapa keluhan dari beberapa masyarakat mengenai pelayanan masyarakat terutama pelayanan administrasi, aparat belum begitu memahami mengenai pelaksanaan tata tertib administrasi, aparatur juga kurang mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan publik, selain itu pihak kecamatan juga tidak peka terhadap fenomena-fenomena yang ada dilapangan, camat lebih jarang memberikan pencerahan, sehingga menyebabkan pekerjaan yang dilakukan aparat tidak terarah dengan baik.*

**Kata Kunci:** *Peran Camat, Kinerja Aparatur*

## **Pendahuluan**

Di era otonomi, kecamatan sesungguhnya merupakan tingkat pemerintahan yang memainkan peranan penting dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat, terutama dalam masa pembangunan. Pentingnya peranan kecamatan itu ditambah adanya tuntutan warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik,

sehingga dalam proses pelaksanaan kegiatan layanan kepada publik diperlukan kemampuan dan kapasitas pemerintah kecamatan yang benar-benar memadai.

Selama ini, dalam batas-batas tertentu harus diakui bahwa pemerintah kecamatan di Kota Surabaya sudah berupaya untuk memperbaiki pelayanannya dalam kerangka memenuhi kebutuhan warganya. Perlunya Pelimpahaan Wewenang Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan sudah dilakukan, namun optimalisasinya terhambat karena tidak jelasnya pembagian kewenangan kepada kecamatan. Sebagian besar urusan pelayanan publik yang ditangani kecamatan hanyalah berupa legalisasi surat dari kepala kelurahan atau rekomendasi untuk di lanjutkan ke pemerintah kota. Hal ini jelas mengakibatkan dilema bagi kecamatan, di satu sisi ingin memberikan pelayanan yang mudah, murah dan cepat, namun disisi lain terhambat oleh sedikitnya kewenangan untuk menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk itu adalah pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota kepada camat untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan adanya pelimpahan wewenang diharapkan beberapa pelayanan publik seperti pemberian ijin dan pelayanan non perijinan dapat diselesaikan secara langsung di kecamatan. Hal ini jelas akan memberikan semangat yang cukup kuat kepada pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam pemberian layanan kepada masyarakat dan memudahkan warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang murah, cepat dan berkualitas.

Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat ini selain merupakan tuntutan dari warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan berkualitas, juga merupakan amanat dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 126 ayat 2 yang berbunyi "kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah". Sebagai organisasi administrative yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat dengan penuh dinamika, maka kecamatan menghadapi banyak masalah yang dihadapi lebih banyak bersifat manajerial dibandingkan misalnya dengan yang bersifat politis.

Mencermati eksistensi kelurahan sebagai perangkat daerah yang terletak diwilayah kecamatan Sukolilo kota Surabaya, maka camat sebagai selaku kepala wilayah kecamatan maka harus bertanggung jawab terhadap untuk melancarkan pada roda pemerintahan kelurahan, disinilah tugas dan kewenangan camat yang ditantang dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, melalui pembagunan, maupun pembinaan kinerja aparatur dan kesejahteraan masyarakat melalui tugas pelayanan yang harus dilaksanakan sebaik mungkin, karena kinerja aparatur pemerintahan kelurahan berpengaruh secara umum terhadap kinerja organisasi perangkat daerah lainnya.

Bisa di pahami juga Camat mengembangkan serangkai tugas dan wewenang yang harus dijalankan dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008

tentang Kecamatan. Di dalam rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa “Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang meliputi 7 indikator”. Dalam Pasalnya 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 disebutkan bahwa, Tugas Camat dalam membina dan menyelenggara kinerja aparatur pemerintahan kelurahan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi: (a). melakukan pembinaan dan pengawasan tata tertib administrasi pemerintahan kelurahan; (b). memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi pemerintah kelurahan;(c).melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah;(d).melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat pemerintah kelurahan;(e).melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan; dan (f).melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota. Seterusnya Pasal 27 mengatakan Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja di wilayah kecamatan. Koordinasi yang dimaksud ialah koordinasi camat untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang di selenggarakan di wilayahnya, guna mewujudkan penyelenggaraan di pemerintah yang efektif dan efisien.

Sebagai seorang kepala kecamatan, Camat adalah merupakan seorang pemimpin bagi aparatur dan masyarakat dalam wilayah kecamatan, maka yang mana akan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Kepemimpinan camat sangat berpengaruh terhadap proses bekerjanya suatu sistem dari kamponen-komponen (kinerja aparatur pemerintah kecamatan) dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sehingga akan terwujud suatu kualitas kerja yang akan dicapai. Kelurahan Keputih merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Sukolilo, yang mempunyai kesamaan fungsi dengan kelurahan-kelurahan yang lainnya yakni, salah satunya pelayanan kepada masyarakat. Dari pengamatan awal pengamatan penulis di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, Kinerja aparatur Pemerintahan kelurahan belum maksimal terlihat dari beberapa keluhan dari beberapa masyarakat mengenai pelayanan masyarakat terutama pelayanan administrasi, aparatur belum begitu memahami mengenai pelaksanaan tertib administrasi, penulis juga melihat aparatur pemerintah keluraha keputi kurang mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan publik banyak keluhan dari masyarakat mengenai kinerja yang tidak mampu diperbaiki oleh pemerintah kelurahan, sehingga beberapa konflik kecil seperti adu mulut dengan masyarakat tidak terelakkan.

Selain dari hal-hal diatas penulis juga melihat pihak kecamatan tidak peka terhadap fenomena-fenomena yang ada dilapangan, camat yang dilegitimasikan menjalankan undang-undang seharusnya membina kinerja aparatur pemerintahan kelurahan Keputih dalam rangka meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya. Supervise atau pengarahan serta pengendalian dari pihak kecamatan kepada pemerintah kelurahan tidak maksimal, camat jarang memberikan pengarahan langsung kepada aparat kalaupun ada hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja menyebabkan pekerjaan yang

dilakukan oleh aparatur pemerintahan tidak terarah dengan baik. Maka dari inilah diharapkan camat memberikan bimbingan, supervisi memfasilitasi serta menjadi konsultan bagi aparatur pemerintahan kelurahan, apabila mereka membutuhkan sesuai dengan amanat dari peraturan pemerintah. Sehingga berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengambil topik penelitian dengan menekankan pada Peran Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Kelurahan Kota Surabaya.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong, (2006:34) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai sumber instrumen yakni sebagai pengumpul data secara langsung. Data yang diteliti dapat mengalir apa adanya (Alamiah) tanpa adanya seting-seting. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif dapat diperlukan informan. Antara informan dan peneliti memiliki hubungan yang sangat erat, karena tanpa informan penulis tak akan banyak mendapatkan informasi yang mengalir masuk khususnya dalam mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

## **Hasil Pembahasan**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Aparatur pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik di kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik adalah hasil kerja atau pencapaian kerja dari aparatur (pegawai) dalam melakukan pelayanan administrasi yang prima sehingga dapat dilihat apakah pelayanan tersebut mengalami peningkatan atau tidak.

Maka untuk menjawab tujuan penelitian tersebut telah dilakukan proses wawancara terhadap beberapa informan. Data atau informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan prosedur yang telah disebutkan dalam metode penelitian. Hasil analisis data wawancara dikemukakan sebagai berikut.

### **1. Produktivitas**

Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting (Dwiyanto 2002).

Berdasarkan konsep tersebut maka dalam penelitian ini produktivitas terbagi menjadi dua aspek yaitu: efektivitas, apakah kebijakan/program/kegiatan yang ditetapkan sehubungan dengan tugas fungsi dan wewenang dari aparat pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan efisiensi, dilihat dari rasio atau perbandingan antara hasil kebijakan/program/kegiatan yang dicapai dengan besar anggaran/dana yang digunakan atau perbandingan antara hasil kebijakan/program/kegiatan yang dicapai dengan sumber daya manusia atau tenaga yang digunakan.

Dalam rangka tugas fungsi dan wewenang tersebut setiap bagian dikantor kelurahan Keputih menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Menurut hasil wawancara dengan informan bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan setiap

seksi dapat dilaksanakan walaupun terkadang tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan karena ada beberapa kendala yang dihadapi. Berikut dikemukakan hasil wawancara dengan informan:

“Setiap kelurahan mempunyai program dan kegiatan sesuai dengan bidang fungsi tugas dan wewenang masing-masing untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam hal ini, kami sebagai aparat pemerintah kelurahan sedapat mungkin melaksanakan program atau kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, walaupun mungkin ada beberapa kendala yang dihadapi namun kami tetap berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat di Kelurahan Keputih. Kendala-kendala yang dihadapi disebabkan oleh kurangnya bimbingan dan kurangnya tenaga kerja sehingga hasil kinerja aparatur yang didapat kurang maksimal kepada masyarakat kepala kelurahan.” (Informan no.1 Itaqwati Oetami, SE,MM ).

“Dalam rangka pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan Keputih, ada beberapa yang berhasil dilakukan dengan baik adapula yang kurang berhasil. Sebagai warga masyarakat yang merasakan langsung kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kelurahan Keputih secara keseluruhan kami menilai masih kurang baik, karena terkadang tidak tepat waktu. Kami sebagai masyarakat sering menunggu hingga banyak waktu yang terbuang percuma.” (Informan no. 2 Anan Purwanto, SE)

Pernyataan Informan no. 1 dan 2 tersebut menunjukkan bahwa kebijakan/program/kegiatan yang dilakukan pemerintah kelurahan Keputih belum maksimal disebabkan sering terjadi penundaan waktu penyelenggaraan pemberian pelayanan karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi kurang tenaga kinerja aparatur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produktivitas pelayanan pemerintah kelurahan Keputih masih kurang baik.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjukkan apakah aktivitas pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan kepentingan masyarakat dengan norma-norma dan etika yang berkembang di masyarakat. Akuntabilitas pelayanan menggambarkan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan kepada pengguna jasa dalam hal ini adalah masyarakat kelurahan Keputih.

Berdasarkan konsep tersebut maka dalam penelitian ini akuntabilitas untuk melihat seberapa besar pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi dan kinerja aparatur pemerintah kelurahan Keputih dalam meningkatkan pelayanan publik apakah sudah sesuai dengan kehendak publik. Menurut hasil wawancara dengan informan bahwa akuntabilitas pelaksanaan pelayanan publik selama ini masih kurang baik. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa pemerintah kelurahan bertanggungjawab kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan publik. Hingga saat ini pemerintah kelurahan terus meningkatkan akuntabilitas agar masyarakat lebih puas dan percaya pada pemerintah kelurahan di Keputih. Dari yang saya lihat, belum semua masyarakat puas dengan akuntabilitas pelayanan yang kami berikan. Nah inilah yang menjadi tantangan kami sebagai aparat pemerintah kelurahan agar kedepan bisa memaksimalkan akuntabilitas pelayanan sehingga semua warga masyarakat puas dengan kinerja yang kami berikan.” (Informan no. 3)

“Setiap program atau kebijakan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah kelurahan Keputih masih kurang baik, pelayanannya masih kurang terbuka atau transparansinya

kurang baik. Dalam mengurus berkas di kelurahan pelayanan yang diberikan berbelit-belit, ada saja berkas yang kurang. Kami sebagai masyarakat kurang paham dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan berkas karena aparat pemerintah kurang memberikan informasi. Nanti ketika ada yang mengurus baru mereka akan memberikan informasi, itupun masih kurang jelas sehingga kami harus bolak balik melengkapi persyaratan berkas tersebut.”

### 3. Kualitas

Layanan Kualitas layanan merupakan faktor penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Kotler (1994) dalam (H Surjadi 2009) mengartikan kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang ia rasakan dibandingkan dengan harapan.

### 4. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas merupakan daya tanggap pemberi layanan kepada keinginan dan harapan masyarakat sebagai penerima layanan. Dalam pelayanan publik, responsivitas sangat dibutuhkan karena hal tersebut merupakan salah satu bukti dari kemampuan pemberi pelayanan untuk mengenali kebutuhan masyarakat.

### 5. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan suatu pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa dalam suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. Responsibilitas dapat dilihat dari bagaimana respon masyarakat terhadap sebuah pelayanan yang diberikan atau dilakukan aparat pemerintah kelurahan (Lenvine dalam Dwiyanto 2002).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa responsibilitas pelayanan publik di kantor kelurahan Tingkulu masih kurang baik dikarenakan faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum memadai serta adanya aparat yang terlambat datang atau keluar kantor pada jam kerja sehingga waktu yang digunakan untuk mengurus berkas menjadi lebih lama.

Dari keseluruhan hasil penelitian diatas dapat memberikan kesimpulan bahwa kinerja aparat pemerintah kelurahan Keputih dalam meningkatkan pelayanan publik masih kurang baik dilihat dari indikator kinerja yang dipakai yaitu: (1) Produktivitas, (2) Akuntabilitas, (3) kualitas layanan, (4) Responsivitas, (5) Responsibilitas. Dari 5 indikator kinerja yang digunakan, 4 indikator menunjukkan kinerja yang kurang baik dan 1 indikator yang menunjukkan kinerja cukup baik.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan Kinerja Aparatur pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah hasil kerja atau pencapaian kerja dari pegawai dalam melakukan pelayanan administrasi yang prima sehingga dapat dilihat apakah pelayanan tersebut mengalami peningkatan

atau tidak. Dalam penelitian ini kinerja aparatur pemerintah kelurahan dalam meningkatkan pelayanan publik dikantor kelurahan Keputih Kota Surabaya diukur dari indikator yaitu Produktivitas, Akuntabilitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, dan Responsibilitas.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan 5 indikator yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Diukur dengan indikator Produktivitas, kebijakan/program/kegiatan yang dilakukan pemerintah kelurahan Keputih belum maksimal disebabkan sering terjadi penundaan waktu penyelenggaraan pemberian pelayanan karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produktivitas pelayanan pemerintah kelurahan Keputih masih kurang baik.
2. Diukur dengan indikator Akuntabilitas, menunjukkan bahwa masih kurangnya akuntabilitas pelayanan yang diberikan pemerintah kelurahan Keputih dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan aparat pemerintah kelurahan kepada masyarakat.
3. Diukur dengan indikator Kualitas Layanan, Masih kurangnya kualitas layanan disebabkan oleh adanya aparat kelurahan yang masih baru dan masih menyesuaikan dengan lingkungan kerja yang ada kelurahan Keputih serta ada pula aparat yang dalam pengurusan berkas sengaja memperlambat prosesnya agar diberikan imbalan atau uang pelicin untuk mempercepat pengurusan berkas sehingga hanya kalangan masyarakat menengah keatas yang pengurusan berkasnya lebih cepat dibandingkan masyarakat menengah kebawah.
4. Diukur dengan indikator Responsivitas, pelayanan publik aparat pemerintah kelurahan Keputih sudah cukup baik. Masyarakat sudah cukup puas dengan responsivitas aparat pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
5. Diukur dengan indikator Responsibilitas, pelayanan publik dikantor kelurahan Kelurahan masih kurang baik dikarenakan faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum memadai serta adanya aparat yang terlambat datang atau keluar kantor pada jam kerja sehingga waktu yang digunakan untuk mengurus berkas menjadi lebih lama.

### **Daftar Pustaka**

- Dwiyanto Agus, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Pasolong, Harbani, 2008, *Kepemimpinan Birokrasi*, Makasar: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani, 2008, *Teori Administrasi Publik*, Makasar: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani, 2012, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Makasar:.
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono, 2010 *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta.
- Supranto, J. (2001). *Statistik Teori dan Aplikasi*. Cetakan kedua. Jakarta: Erlangga
- Surjadi. H, 2009, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, PT. Refika Aditama Bandung
- Bayu Suryaningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintah*. Jakarta Rineka Cipta, 1987. Dale. Furtmenger, 2007, *Penilaian Kinerja*, Penerbit Andi Offset Yogyakarta.



- Dwiyanto Agus, 2005, *Penilaian Kerja Organisasi Publik*, Penerbit PT Gramedia Jakarta.
- Fagg D.D. 1958, *Authority and Social Structure: a Study in Javanese bureaucracy* Cambridge, Masschusetts, Harvard University (Microfilm).
- Guilbert, 1977, *The Personal Function In Administration*, MC. Graw Hill Book Gardom Thoms
- 1994, *menjadi pemimpin yang efektif. Dasar untuk manajemen partisipasi dan keterlibatan kariawan*, Jakarta
- Hanif Nurcholis , *Dalam pertumbuhan dan penyelenggaraan kelurahan Moleong. Metode Penelitian*
- Nico Schlte Nordholt 1987, *Ojo Dumech- Kepemimpinan Lokal Dalam Pembangunan* Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Noto Atmodjo, 2002, *Penilaian Kinerja Camat*, Penerbit CV Usaha Nasional Jakarta.
- Salim. A. 1989, *Analisis Manajemen Modern*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada.